

ABSTRAKSI

DITA FIBRIANI, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2013, *Optimalisasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Terkait Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah (Studi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar)*, Agus Yulianto SH.MH., Lufti Effendi SH.Mhum.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dana tersebut diberikan pemerintah pusat kepada daerah dalam bentuk dana perimbangan. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-empiris yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan data-data mengenai DBHCHT. Hasil pemerilatan yang diperoleh berupa pengumpulan data program-program terkait DBHCHT pada tahun 2008 sampai dengan 2011 yang dibuat oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Maka hasil dari penelitian tersebut, penulis dapat mengetahui program apa saja yang dilakukan guna mengoptimalkan DBHCHT di Kabupaten Blitar.

Blitar is one area receiving tax allocation fund. Grants were awarded to local government in the form of matching funds. This research was conducted with the juridical-empirical method is to conduct research directly into the field to gather information and data regarding the allocation of funds clearance. The results obtained pemerilatan form of data collection related programs excise allocation of funds in 2008 through 2011 yang made by the Department of Industry and Trade Blitar. So the results of this study, the authors can find out what programs are conducted in order to optimize the allocation of tax funds in Blitar.

Optimalisasi Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Oleh Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Blitar

A. Pendahuluan

Demi terciptanya pembangunan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia perlu adanya dana perimbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dalam anggaran tahunan APBN disebutkan program-program pelaksanaan pembangunan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Perlu dicermati bahwa anggaran tersebut merupakan amanah rakyat yang dititikan kepada eksekutif untuk kesejahteraan rakyat.¹

Sektor perdagangan dan industri di daerah yang memiliki aset bernilai tinggi yaitu tembakau. Tembakau tersebut merupakan bahan produksi mentah yang dapat dijualbelikan atau diolah menjadi barang produksi yang bernilai tinggi bagi cukai. Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa.² Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan dana bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hasil dari pembayaran pajak berupa cukai tembakau. Pembayar cukai tembakau adalah konsumen pemakai bahan baku produksi yang memiliki pita cukai dan hasil tembakau mentah yang dijualbelikan untuk produksi pabrik.

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang disalurkan Kabupaten Blitar digunakan untuk pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.³ Dapat diketahui betapa pentingnya penyaluran Dana Hasil Bagi

¹<http://p3b.bappenas.go.id/anggaran.ppt> diunduh pada tanggal 16 Oktober 2012 pukul 12.30 WIB.

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

³ Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Cukai Hasil Tembakau untuk kesejahteraan masyarakat binaan Kabupaten Blitar terutama yang disekitar pabrik rokok. Dalam otonomi daerah, aspek yang paling penting adalah bagaimana pengelolaan pendapatan daerah sehingga masyarakat memperoleh kepuasan yang tinggi terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar Tahun 2008 tercatat 61,99 milyar, Tahun 2010 tercatat 66,52 milyar, tahun 2012 tercatat 77,03 milyar. Pada tahun 2008 pabrik rokok di Kabupaten Blitar yang telah didata oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan berjumlah sekitar 18.000 (delapan belas ribu) pabrik rokok baik industri besar maupun industri kecil. Namun tahun 2012 sekarang ini tercatat tersisa 18 (delapan belas) pabrik rokok yang ada di Kabupaten Blitar. Berkurangnya pabrik rokok sedemikian drastis tersebut otomatis berdampak pada banyaknya pengangguran akibat pemecatan pegawai pabrik rokok tersebut. Maka sumber daya manusia di sekitar pabrik rokok menjadi rendah dan pada akhirnya tutupnya pabrik-pabrik rokok tersebut mengurangi pendapatan asli daerah Kabupaten Blitar.

Menteri Keuangan seharusnya memperbaiki peruntukan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) agar lebih fokus untuk petani dan buruh tembakau. Menteri Keuangan harus mengakomodasi dalam aturan terhadap kebutuhan petani, khususnya petani dan buruh tembakau. Kegagalan petani dan buruh industri tembakau memanfaatkan DBHCHT akan memperkeruh kondisi pertanian di Indonesia. Diketahui bahwa sumber keuangan berasal dari kalangan pertanian. Hingga kini masyarakat petani dan buruh industri tembakau tidak merasakan manfaat DBHCHT. Pengalokasian DBHCHT yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang DBHCHT itu sendiri tidak

dijadikan acuan untuk pengalokasian DBHCHT⁴, maka dari sini dapat diketahui bahwa ada permasalahan hukum terkait pengalokasian DBHCHT agar dapat dialokasikan secara maksimal dan menghindari penyalahgunaan penggunaan DBHCHT oleh pemerintah daerah. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau digunakan untuk mendanai kegiatan, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan dibidang cukai; dan/atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

Hal ini perlu diteliti dampak penurunan secara drastis jumlah pabrik rokok yang ada di Kabupaten Blitar dikarenakan tidak optimalnya pengalokasian DBHCHT untuk sumber daya manusia yang ada di area pabrik rokok. Dilihat dari kegunaan DBHCHT tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya DBHCHT adalah dana yang diperoleh dari hasil cukai, yaitu cukai dipungut dari masyarakat dan kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk kesejahteraan rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan alokasi DBHCHT.

B. Masalah

1. Bagaimana optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terkait rencana pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar?
2. Apa kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam hal alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau?

C. Metode

1. Jenis Penelitian.

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Widyo Guntoro selaku Kepala Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 31 Agustus 2012.

Jenis penelitian *yuridis-empiris*, yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional, yang condong bersifat kuantitatif, berdasarkan data primer.⁵ Penelitian ini didasarkan pada penelitian lapangan dan peraturan perundang-undangan tentang Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) berkaitan dengan program yang dilakukan Pemerintah guna kesejahteraan masyarakat. Hasil data yang telah didapatkan dari penelitian riil, penulis melakukan pengolahan data tersebut sesuai kebutuhan penulis guna memenuhi penulisan skripsi.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis-sosiologis*, yaitu metode pendekatan yang mengkaji terhadap asas-asas dan sistematika hukum serta bagaimana identifikasi dan efektifitas hukum tersebut dalam masyarakat.⁶ Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui tentang penyaluran DBHCHT apakah sesuai dengan program yang telah ditulis dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan DBHCHT diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama terkait dengan hasil tembakau dan sekitarnya.

3. Jenis Data

- a. Data Primer: Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden.⁷ Adapun data primer disini diperoleh dari Kepala Bagian Perindustrian, Kepala Bagian Penyusunan Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan Kepala Bagian Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.
- b. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka atas berbagai penelitian yang ada sebelumnya yang dapat berbentuk laporan penelitian seperti skripsi dan buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya

⁵<http://imam249.blogspot.com/2008/07/perlidungan-hukum-terhadap-anak-dari.html>, diakses tanggal 03 Juli 2008.

⁶Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

⁷Burhan Ashshofa, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 91.

relevan dengan tema dalam penelitian ini.⁸ Adapun data sekunder disini berasal dari data-data DBHCHT yang diperoleh Disperindag beserta program-program tahun 2008-2011. Dilengkapi dengan data yang diperoleh dari data hasil penelitian, penulisan skripsi, melalui studi kepustakaan atau literatur, penelusuran situs di internet, peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber dan pendapat-pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analysis*) yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan. Data yang diperoleh dari penelitian tentang Kajian Yuridis Sosiologis terhadap masyarakat yang berhak mendapatkan penyaluran dana alokasi cukai kemudian dianalisis dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan terutama tentang program-program pelaksanaan penyaluran DBHCHT oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

D. Pembahasan

Untuk membahas tentang optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian optimalisasi alokasi DBHCHT. Optimalisasi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah melakukan hal yang terbaik atau penggunaan yang paling efektif, terbaik, tertinggi. Jadi optimalisasi merupakan upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi. Alokasi yang dimaksud diatas adalah penentuan banyaknya biaya (uang) yang disediakan untuk suatu keperluan pembiayaan. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

⁸Abdulkalir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 41.

Tembakau (DBHCHT) merupakan dana bagi hasil yang diterima oleh pemerintah daerah hasil dari bagi hasil cukai hasil tembakau, dikembalikan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat daerah dalam pelaksanaan program pemerintah daerah terkait peningkatan kualitas bahan baku tembakau, pembinaan industri rokok, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Maka dapat disimpulkan optimalisasi alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah melakukan hal atau upaya yang paling baik dalam penentuan biaya yang disediakan untuk suatu keperluan terkait dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan mengenai pelaksanaan DBHCHT yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, antara lain:

1. Mengoptimalkan Penyusunan Program Kegiatan⁹

Program-program yang dibuat oleh Disperindag Kabupaten Bitar terkait dengan peruntukan pelaksanaan DBHCHT perlu dioptimalkan, program yang dibentuk mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur. Program-program yang telah disusun guna kepentingan pengalokasian DBHCHT tersebut, antara lain:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku
 - 1) Standarisasi kualitas bahan baku.
 - 2) Mendorong pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah.
 - 3) Pengembangan sarana laboratorium uji dan pengembangan metode pengujian.
 - 4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku.
 - 5) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

⁹ Wawancara dengan Bapak Widyo Guntoro selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tanggal 29 Oktober 2012 pukul 10.30 WIB.

b. Pembinaan industri

- 1) Registrasi mesin pelinting sigaret (rokok) tembakau.
- 2) Penerapan ketentuan terkait Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- 3) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau.
- 4) Pemetaan industri hasil tembakau.
- 5) Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) hasil tembakau dan koperasi dengan industri besar hasil tembakau.
- 6) Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau atau rokok.
- 7) Peningkatan dan pengembangan prosen industri hasil tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah.
- 8) Penerapan Good Manufacture Practice (GMP) dalam rangka peningkatan kualitas produk hasil tembakau.
- 9) Penerapan Sosial Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP).
- 10) Pembinaan legalitas industri hasil tembakau atau rokok.
- 11) Peningkatan sistem jaminan mutu tembakau dan rokok.
- 12) Peningkatan kompetensi laboratorium uji.

c. Pembinaan lingkungan sosial

- 1) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- 2) Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu pada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL).
- 3) Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum.
- 4) Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok.

d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai

e. Pemberantasan barang kena cukai ilegal

Pemberantasan barang kena cukai ilegal dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, yang tidak dilekati pita cukai atau polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.

2. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah sumber daya manusia pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan sumber daya manusia masyarakat binaan Kabupaten Blitar yang menjadi sasaran utama pengalokasian FBHCHT.

3. Adanya Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Blitar berkaitan dengan DBHCHT diberi nama GAPERO (Gabungan Pengusaha Rokok) Kabupaten Blitar. organisasi tersebut berfungsi untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat supaya dapat disampaikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar supaya pengalokasian DBHCHT dapat optimal.

Selain program pelaksanaan DBHCHT, hasil dari penelitian meliputi kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terkait pengalokasian DBHCHT kepada masyarakat.

1. Kendala yang dihadapi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, antara lain:

a. Faktor menurunnya industri pabrik rokok yang ada di Kabupaten Blitar.

- b. Faktor sistem alokasi dana dari Pemerintah Pusat yang mengalami keterlambatan diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - c. Faktor pembaharuan program.
 - d. Faktor Kebijakan Pemerintah.
2. Upaya yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, antara lain:
 - a. Melaporkan ketidaksesuaian program dari pemerintah dengan keadaan dilapangannya, dalam kenyataan tidak dapat diserap sesuai kebutuhan masyarakat.
 - b. Mengantisipasi pelaksanaan program yang tertunda.
 - c. Melakukan pembinaan secara terstruktur bagi pegawai Disperindag Kabupaten Blitar.

E. Penutup

Optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Disperindag Kabupaten Blitar sudah optimal, namun masih perlu dioptimalkan supaya lebih baik dengan menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di Disperindag Kabupaten Blitar. Optimalisasi alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang dilakukan Disperindag Kabupaten Blitar tidak dapat terlaksana dengan maksimal apabila tanpa kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas dan masyarakat sebagai sasaran alokasi DBHCHT.

Melihat kesimpulan diatas terutama melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam pelaksanaan optimalisasi alokasi DBHCHT terkait rencana pembangunan kabupaten Blitar, penulis mempunyai saran, yaitu:

1. Segera melakukan penyusunan Peraturan Daerah mengenai pengaturan alokasi DBHCHT yang lebih terperinci sesuai dengan kepentingan masyarakat, keadaan dan potensi daerah.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pegawai melalui pendidikan atau diklat perlu ditingkatkan supaya tercipta pegawai yang berkualitas yaitu pegawai yang mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat.

Pemberian penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan memberikan hukuman terhadap pegawai yang tidak disiplin merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia pegawai.

F. Daftar Pustaka

Abdul Halim, 2004, *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, Togyakarta.

Achmad Abdullah dan Soedarmanto, *Budidaya Tembakau*, 1982, CV. Yasaguna, Jakarta.

Arifin P. Soeria Atmadja, 2009, *Keuangan Politik dalam Perspektif Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Dwi Ratmono dan Imam Ghozali, 2008, *Akuntansi Keuangan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD)*, Badan Penerbit Universitas Ponorogo, Semarang.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2001, Edisi Ketiga, Pusat Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2006, Gramedia Utama, Jakarta.

Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Djafar Saidi, 2008, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soeparyono, *Analisa dan Evaluasi Tentang Cukai*, 1993, Bdan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, 2006, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1946 Tentang Cukai Tembakau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 Tentang Penggunaan Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan
Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum
Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar